

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Boedi Harsono, *Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2013).
- Dhaniswara K Harjono, *Hukum Properti*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2016).
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Panduan Mengurus Tanah Rumah dan Perizinannya*, (Yogyakarta: Legality, 2018).
- Farida Fitriyah, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi: Kebijakan Pengadaan dan Sertifikasi Hak atas Tanah Untuk Transmigrasi*, (Malang: Setara Press, 2016).
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2005).
- Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- J. Andy Hartanto, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertipikat*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018).
- Kurnia Ghazali, *Cara Mudah Mengurus Sertipikat Tanah*, (Jakarta: Kata Pena, 2013).
- Laila M Rasyid dan Heri Nawait, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Martha Erti Safira, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: CV Nata Karya, 2017).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Ricardo Simanjutak, *Hukum Kontrak Teknik Perancang Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011).
- Rosa Agustine, *et.al.*, *Hukum Perikatan*, (Bali: Pustaka Larasan, 2012).
- Rozy Munir, *Transmigrasi*, (Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia, 1981).
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).
- Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- _____, *Hukum Perumahan*, (Jakarta: Internusa, 1998).

_____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).
Soerjono Soekanto, *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).
_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-19, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020).
Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1995).
_____, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2014).
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1996).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek).
Rechtglement voor de Buitengewesten (RBg).
Herzine Indonesische Reglement (HIR).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3696).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6630).
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3746).
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5893).
*Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor ***).*

- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.*
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722).*
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953).*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3682).*
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5050).*
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Ketransmigrasian (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5497).*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802).*
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi Oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Kepada Transmigran (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 98).*
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6571).*

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 475/K/Sip/1970.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 601/K/Sip/1972.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082/K/Sip/1973.
Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.SOS.

D. Karya Ilmiah

- Billy Ariza, “Kedudukan Kuitansi Sebagai Alat Bukti Jual Beli Tanah Dalam Konsepsi Kepastian Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Majalengka)”, Tesis, Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Farida Fitriyah, “Pengadaan Tanah dan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk Transmigrasi”, Disertasi, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- Maria S W, “Aspek Teoritis Peralihan Hak atas Tanah Menurut UUPA”, Majalah Mimbar Hukum No. 18/X/1993, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1993.
- Monica Lidiyana Cahyadi, “Keabsahan Jual Beli atas Rumah dengan Perjanjian Dibawah Tangan yang Hendak Dibuatkan Akta Jual Beli Tanpa Adanya Pihak Penjual”, Tesis, Jakarta: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2021,
- Rionald Dimas, “Publikasi Pendaftaran Tanah di Negara Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum”, Tesis, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2021.
- Sulastiningsih, “Peralihan Hak atas Sertipikat Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi yang Dilakukan Dengan Jual Beli Bawah Tanah (Studi Kasus Para Petani Sawit di Kabupaten Kampar)”, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019, DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3600659>.
- Sumaryono, “Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 220/Pdt.G/2006/PN.BKS)”, Tesis, Semarang: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2009.

E. Sumber Lain

- Badan Informasi Geospasial, “Jumlah Pulau Resmi di Republik Indonesia Capai 17024 Masih Ada Yang Tanpa Identitas”. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230619171810-199-963898/jumlah-pulau-resmi-di-ri-capai-17024-masih-ada-yang-tanpa-identitas>, (diakses pada 11 November 2023).
- Badan Pusat Statistik, “Data Jumlah Penduduk Indonesia”. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-penduduk-indonesia-20132023>, (diakses pada 11 November 2023).
- Badan Pusat Statistik, “Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi”. <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>, (diakses pada 12 November 2023).

- DPC Peradi Tasikmalaya, “Definisi Hukum Menurut Prof E.M. Meyers”, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-mr-eduard-maurits-meijers-e-m-meyers/>, (diakses pada 1 April 2024).
- Mochamad Aris Yusuf, “Mengapa Penduduk Indonesia Sebarannya Tidak Merata”, <https://www.gramedia.com/literasi/mengapa-penduduk-indonesia-sebarannya-tidak-merata/>, (diakses pada 12 November 2023).
- Joan Hardjono, “Transmigrasi: Pengertian, Sejarah, Tujuan dan Bentuknya”. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6992734/transmigrasi-pengertian-sejarah-tujuan-dan-bentuknya>, (diakses pada 13 November 2023).
- Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia, “Penghasil Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. [https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/daerah-penghasil-sumber-daya-alam-dan-dampaknya-terhadap-kesejahteraanmasyarakat#:~:text=Indonesia%20merupakan%20negara%20yang%20banyak,tersebar%20di%20berbagai%20daerah%20Indonesia](https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/daerah-penghasil-sumber-daya-alam-dan-dampaknya-terhadap-kesejahteraanmasyarakat#:~:text=Indonesia%20merupakan%20negara%20yang%20banyak,tersebar%20di%20berbagai%20daerah%20Indonesia.). (diakses pada 15 November 2023).
- Kompasiana, “Mengenal Transmigrasi: Pengertian, Sejarah dan Dampaknya”. <https://www.kompasiana.com/khatibulumam4290/64a2927208a8b53dca4b0562/mengenal-transmigrasi-pengertian-sejarah-dan-dampaknya> (diakses pada 13 November 2023).
- OCBC, “Kuitansi adalah Bukti Transaksi Keuangan Barang Dagang Dalam Jumlah Besar”, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/11/16/kuitansi-adalah#:~:text=Kuitansi%20adalah%20bukti%20transaksi%20keuangan,barang%20dagangan%20dalam%20jumlah%20besar>, (diakses pada 20 Februari 2024).
- Telkomsel, “Pengertian Kuitansi dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.telkomsel.com/jelajah/jelajah-lifestyle/pengertian-kuitansi-dan-jenis-jenisnya#:~:text=Kuitansi%20adalah%20sebuah%20alat%20bukti,yang%20sah%20dari%20transaksi%20tersebut>, (diakses pada 2 Februari 2024).

F. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cetakan ke-4. (Jakarta: Gramedia Pusat Utama, 2000).

G. Wawancara

Hasil wawancara dengan Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta Dosen Fakultas Hukum di Universitas Jayabaya, 2 April 2024.

Hasil wawancara dengan Yohanes Hery Santosa, S.T., Pegawai Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 25 Maret 2024.